

BAB III

PEMBAHASAN

A. Analisis Ukuran Keberhasilan *Callobarative Govenance*

Untuk mengetahui lebih mendalam tentang kolaborasi terkait program *one village one product* (OVOP) antara pihak pemerintahan dengan pihak lainnya, maka perlu melakukan penelitian dengan sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi *callobarative govenance*, untuk menganalisis permasalahan tersebut peneliti menggunakan teori desave (2007) sebagai berikut:

1. Struktur Jaringan

Pada konsep *networked structure*, indikator ini tidak boleh menciptakan hirarki karena hal ini akan menyebabkan ketidak efektifan, dan struktur jaringan harus terorganisir dengan struktur organisasi yang seminimal mungkin, agar tidak ada hirarki kekuasaan, monopoli, dominasi, agar terciptanya kesetaraan baik dari tanggungjawab, kewajiban, kesempatan untuk aksesibilitas dan otoritas.

Kolaborasi penyedia modal antara TKPK, BNI dan kelompok usaha OVOP. TKPK disini berwenang sabagai *leader* koordinasi dengan semua bagian yang terlibat dalam pelaksanaan program kelompok usaha OVOP, selain itu juga sebagai pengelolah dan penyalur dana bantuan yang diambil dari anggaran APBD Kabupaten Bantul sebagai pengembangan usaha yang sudah memiliki embrio sebelumnya, Untuk penyaluran dana

ABPD tidak bisa langsung disalurkan ketika kelompok memiliki kebutuhan yang secepatnya harus dipenuhi, maka pihak pemerintah bekerja sama dengan pihak BNI dengan mengajukan data-data kebutuhan kelompok untuk memberi bantuan dana kepada kelompok usaha OVOP.

Dalam melaksanakan tugas dan kerjasama antara pihak pemerintah dan pihak BNI dan CSRnya bertanggung jawab kepada instansinya karena BNI ini memiliki profit yang mempunyai susunan organisasi sendiri selain itu juga memberikan laporan pertanggung jawaban kepada pihak pemerintah terkait bantuan yang telah disalurkan, sedangkan kelompok usaha OVOP disini berperan sebagai pihak penerima bantuan yang independen. Sesuai yang diutarakan oleh ibu Eni Kriswandari selaku analis pemberdayaan masyarakat :

“kami dan pihak BNI dan CSRnya berkerjasama untuk mencari bantuan untuk kelompok usaha dengan kami memberikan data-data terkait kelompok usaha kemudian menitervensi, untuk survey kami dan pihak BNI melakukan karena yang tau kelompok usaha adalah kami, jika nanti misal ada keterlambatan pemberian bantuan nanti kita membantu untuk menagih atau menanyakan kepada pihak BNI.”

Berdasarkan hasil wawancara pelaksanaan kolaborasi antara kedua belah pihak berjalan sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing kepada instansinya. Sehingga struktur jaringan pada kolaborasi ini berbentuk *flat* dan tidak terdapat unsur hirarki jadi tidak menyebabkan monopoli dan dominasi dalam kolaborasi ini.

Pada penyelenggaraan pameran yang menjadi agenda tahunan pemerintah Kabupaten Bantul dengan mengikutkan semua hasil prodak kelompok usaha OVOP/PAS yang menjadi sasaran dari program tersebut. Kelompok usaha disini adalah pihak independent yang tidak memiliki kewajiab dan tanggungjawab kepada pemerintah akan tetapi pihak pemerintah disini lebih dominan dalam kegiatan. Seperti yang disampaikan oleh ibu yanti:

“ disini kebanyakan peran dari pemerintah dalam pengembangan usaha karena sering dilakukan pelatihan-pelatihan usaha tapi walaupun seperti itu kelangsungan usaha tetap ditentukan pemerintah terkait dipilih atau tidaknya sebagai kelompok usaha.”

Unsur hirarki terlihat dari pertanggung jawaban Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koprasi dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selaku pelaksanan pameran bertanggung jawab kepada pihak TKPK selaku *leader sector* dalam pelaksanaan program OVOP/PAS .

Secara keseluruhan struktur jaringan pada kolaborasi ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, akan tetapi pemerintah menjadi *stakeholder* paling dominan dalam kolaborasi ini dalam menangani dan mengambil keputusan terkait pengembangan kelompok usaha OVOP dibandingkan dengan *stakeholder* lainnya.

2. Komitmen Terhadap Tujuan

Kolaborasi yang terjalin antar pihak pemerintah dengan *stakeholder* mengacu pada upaya pengembangan kelompok usaha OVOP/PAS yang memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi daerah yang bermuatan kearifan lokal dan untuk membantu peningkatan pendapatan masyarakat sehingga bisa menekan angka kemiskinan di Kabupaten Bantul. Dalam hal ini BAPPEDA yang ruang lingkupnya menugaskan kepada TKPK untuk membantu bupati dalam melaksanakan kewenangan pemerintah Kabupaten Bantul dalam menjalankan program OVOP/PAS sebagai trobosan untuk menanggulangi kemsikinan yang ada di Kabupaten Bantul. Dalam program ini pihak BAPPEDA bekerjasama dengan, OPD, BNI dan kelompok usaha terkait dalam hal pelaksanaan program ini diperlukan komitmen dari masing-masing instansi maupun persorangannya, akan tetapi realitanya perhatian pemerintah dengan kelompok usaha mulai berkurang seperti pada kolaborasi dalam upaya permodalan. Kerjasama pada BNI masih terjalin tetapi untuk pemberian modal pada beberapa tahun ini sedikit berkurang.

Hal ini dikarenakan pendanaan masih cukup ditanggung dengan dana APBD. Untuk beberapa tahun ini memang pemerintah lebih memfokuskan pada pengembangan kelompok usaha yang sudah mempunyai embrio usaha yang bisa dikembangkan karena hal

tersebut lebih memudahkan untuk melakukan koordinasi dibandingkan dengan kelompok usaha yang masih tekotak-kotak atau terpecah. Seperti yang diutarakan ibu Eni Kriswandari selaku analis pemberdayaan masyarakat :

“ kalau kerjasama dengan BNI tetap berjalan tetapi kita untuk tahun ini masih cukup menggunakan dana APBD, karena kita hanya melakukan pembinaan hanya kepada kelompok usaha yang sudah memiliki embrio usaha sebelumnya itu lebih kami utamakan seperti mie des yang ada di pundong itu sudah lama usahanya ada”.

Sedangkan menurut pihak BNI, kerjasama dengan pihak pemerintah terkait pengembangan usah masih berjalan dengan baik, dalam kerja sama ini pihak BNI hanya mengeluarkan anggaran atau bantuan ketika ada data masuk dari pemerintah terkait pendanaan yang dibutuhkan untuk pemerintah untuk membantu pengembangan usaha dari program yang sedang pemerintah kerjakan.

Hal ini disampaikan sah satu staff dari BNI mengatakan sebagai berikut :

“ kerjasama kami dengan pemerintah sudah cukup lama dan berjalan dengan baik, terkait dengan membantu pendanaan memang pihak kami membantu untuk pelaksanaan tapi kita membentunya setelah ada data yang diserahkan kepada pihak kami kemudian kami intervensi untuk kami lihat mana saja yang akan kami beri bantuan”

Kolaborasi penyelenggaraan pameran oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk kelompok usaha dalam program OVOP/PAS

sudah berjalan cukup baik komitmen pemerintah dalam mempromosikan prodak-prodak unggulan yang dimiliki kelompok usaha hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatkan usaha-usaha dari kelompok usaha yang ada disetiap kecamatan di Kabupaten Bantul.

Selain itu untuk menjaga komitmen disemua pihak untuk menyelaraskan tujuan dan visi misi pemerintah selalu melibatkan semua pihak dalam pengambilan keputusan dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dimana keputusan penuh nantinya akan diputuskan oleh pemerintah untuk sepakati bersama.

Hal ini sampaikan ibu Eni Kriswandari selaku analis pemberdayaan masyarakat :

“kami dari pihak pemerintah untu mejaga komitmen dari semua pihak, kami selalu melibtakan semuanya dalam pengambilan keputusan mulai dari perencanaan dan pelaksanaan yang keputusannya nanti kami yang memutuskan untuk disepakati bersama ”

Berdasarkan keseluruhan kolaborasi diatas, komitmen dan pemerhatian dari pihak pemerintah dan instansi cukup baik, sudah sesuai rencana kerja dari TKPK yang melakukan pembinaan, pembangan, dan promosi untuk kelompok usaha dalam memasaran prodak yang dihasilkan melalui pameran selain itu juga dalam menjaga komitmen pemerintah selalu melibatkan semua pihak dalam penngambilan keputusan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan program akan tetapi kedepannya agar lebih bisa

berkomitmen dengan pihak swasta dalam pengembangan permodalan jadi tidak selalu bergantung dengan APBD selain itu untuk pemerintah kedepannya jangan mendominasi dalam setiap pengambilan keputusan.

3. Adanya Saling Percaya Diantara Para Pelaku

Dalam sebuah kolaborasi sangat diperlukan membangun kepercayaan antar *stakeholder*. Terkait kolaborasi antara pihak pemerintah, BNI, dan kelompok usaha harus ada rasa percaya satu dengan yang lain. Kolaborasi permodalan usaha pemerintah dengan pihak BNI sudah berjalan dengan baik dan sudah ada saling percaya dari kedua belah pihak karena kolaborasi yang dijalin sudah berjalan cukup lama hampir disemua program pemerintah BNI ikut telibatn didalamnya, sebagai salah satu programnya adalah program OVOP.

Hal ini disampaikan oleh salah satu staff BNI sebagai berikut:

“kami berkerja sama denga pemerintha sudah cukup lama berjalan, hampir sering kami dilibatkan oleh pemerintah dalam kegiatan dan programnya, salah satunya terkait program OVOP, yang barkaitan dengan kelompok usaha “

Namun dari pihak pemerintah masih kurang percaya kepada pihak kelompok usaha dengan adanya pemberian bantuan dana secara langsung yang dilakukan oleh pihak swasta karena

pihak pemerintah menilai jika dana bantuan diserahkan dalam bentuk uang nantinya digunakan oleh pihak kelompok usaha untuk pemenuhan kebutuhan konsumtifnya bukan malah untuk pengembangan usahanya.

Hal ini disampaikan oleh ibu Eni Kriswandari selaku analis pemberdayaan masyarakat sebagai berikut :

“ dengan adanya bantuan secara langsung oleh pihak swasta sebenarnya kadang menimbulkan dari pihak kami karena takutnya tidak untuk pengembangan usaha tapi untuk biaya konsumtif mereka sehari-hari”.

Sedangkan dalam kolaborasi pelaksanaan pameran pemerintah melibatkan OPD sebagai penanggung jawab pelaksanaannya dan promotor produk-produk unggulan dari daerah jadi banyak lintas OPD yang ikut yang terlibat dalam pelaksanaan ini, dan kelompok usaha sebagai peserta pameran untuk membantu menyelenggarakan dan mempromosikan produk-produk usaha yang menjadi unggulan di setiap masing-masing daerah.

Hal ini di sampaikan oleh Eni Kriswandari selaku analis pemberdayaan masyarakat, beliau mengatakan sebagai berikut :

“ Dalam menjaga kepercayaan dari masing-masing instansi yang terlibat kami selalu melibatkan semua instansi dalam setiap kegiatan yang kaitannya dengan program OVOP ini, misalkan pada saat pameran kita melibatkan Dinas Perindustrian dan Pariwisata itu sebagai pelaksana, dan kelompok usaha sebagai peserta pameran. Disini OPD yang ikut dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan jadi bisa jadi nantinya terjadi lintas OPD”

Hal tersebut juga dibenarkan oleh kelompok masyarakatnya bawasanya dengan diselenggarakannya pameran mampu membantu masyarakat dalam mengenalkan prodak usaha yang sudah dihasilkan dan hal ini juga menjadi sinyal positif untuk masyarakat karena ada usaha dari pemerintah dalam mengembangkan dan mengenalkan prodak-prodak unggulan dari Kabupaten Bantul.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh ibu yati sebagai berikut:

“ masalah pameran tersebut membantu kelompok usaha dalam mengenalkan usahanya, dan menjadi sesuatu yang baik jadi usaha kami bisa dikenal orang luar “

Berdasarkan penjabaran tersebut terkait dengan indikator kepercayaan diantara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat sudah baik dalam pelaksanaannya namun masih ada rasa kurang percaya dari pihak pemerintah kepada pihak kelompok usaha terkait dengan dana bantuan langsung yang diberikan oleh pihak swasta kepada kelompok usaha.

4. *Governance*

Ruang lingkup *Governance* sebagai berikut yaitu: adanya batasan-batasan siapa saja yang boleh terlibat dan siapa yang tidak boleh terlibat, terdapat peraturan yang menegaskan pembatasan perilaku anggota organisasi dalam hal-hal tertentu yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, dapat memutuskan bagaimana kolaborasi yang dilaksanakan, dan jaringan *management*

yang berkaitan dengan tantangan, kontrol, kualitas, alokasi sumber daya, dan merawat organisasi (Sudarmo,2011:35).

Dalam kerjasama penyediaan modal disini ada pembatasan siapa yang boleh terlibat didalamnya yaitu pemerintah (TKPK), BNI, dan kelompok usaha. Sudah ada aturan yang jelas atau *road maps* yang mengatur mengenai peran masing-masing seperti TKPK sebagai koordinator dalam pelaksanaan program OVOP, dan penyeleksi kelompok usaha yang bisa menjadi sasaran OVOP serta mengadakan sosialisasi sedangkan pihak BNI adalah sebagai donatur atau penyumbang dana yang diberikan langsung kepada kelompok usaha serta membantu pemerintah untuk melakukan sosialisasi. Walaupun sudah ada menjalankan peran, *stakeholder* diberikan kebebasan menjalankan aktifitas lain sesuai dengan visi misi *stakeholder*.

Kaitannya siapa yang menjadi anggota dan bukan anggota memang tidak ada bukti tertulis yang menyatakan *stakeholder* sebagai anggota tetapi dalam kaitanya dengan pameran, pemerintah bekerjasama dengan antar OPD dan kelompok usaha sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan prodak hasil usaha sehingga kelompok usahalah yang mengetahui seluk beluk pembuatan dan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok usaha. Tidak ada aturan secara tertulis dalam kolaborasi pelaksanaan pemeran tetapi masing-masing *stakeholder* bisa mejalankan peran masing-masing.

Dalam indikator *governance* tidak ada kendala karena dalam pembagaian kekuasaan, kewenangan dan juga keanggotaan yang terlibat sudah diatur dalam *road maps* TKPK

5. Akses Terhadap Kekuasaan

Pemerintah dengan BNI, serta kelompok usaha otoritas masing-masing untuk menjalankan kegiatan sebagai upaya pengembangan program OVOP melalui kelompok usaha. Dalam penyedia modal, pemerintah memberi wewenang kepada BNI sebagai fasilitator antara pihak TKPK dengan kelompok usaha. Pihak BNI bersama CSR diberi kewenangan oleh pemerintah untuk memberikan bantuan secara langsung kepada kelompok usaha setelah mengintefensi data yang diajukan oleh pihak TKPK.

Hal tersebut disampaikan oleh ibu Eni Kriswandari selaku analis pemberdayaan perempuan sebagai berikut:

“ kami memberi wewenang kepada pihak BNI untuk memberikan bantuan secara langsung untuk kelompok usaha”.

Adanya kejelasan otoritas yang diberikan serta didukung adanya petunjuk teknis yang mempermudah pihak BNI dan pemerintah untuk menjalankan kegiatan dan tugas masing-masing. Sedangkan dalam pelaksanaan pameran ditangani oleh Dinas

Perindustrian, Perdagangan, dan Koprasi, bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta melibatkan kelompok usaha, pameran disini tidak ada prosuder secara tertulis bagaimana prosedur pelaksanaan dari pameran tersebut, hanya kelompok usaha diundang untuk datang mengikuti pameran dan membawa hasil prodak meraka, karena tujuan dari pameran ini adalah untuk mempromosikan prodak hasil produksi kelompok usaha yang tergabung dalam kelompok usaha OVOP.

Hal ini disampaikan ibu Eni Kriswandari selaku analis pemeberdayaan masyarakat:

“ dalam penyelenggaraan pameran kita mengundang semua kelompok usaha yang tergabung dalam kelommpok usaha OVOP”

Dari hasil wawancara diatas menunjukan bawasan sudah ada otoritas yang jelas di setiap masing-masing *stakeholder*. Dengan adanya kejelasan tersebut maka *stakeholder* bisa melaksanakan wewenang dan mengimplementasikan keputusan yang sudah di buat.

6. Pembagian Akuntabilitas / Responsibilitas

Dalam pelaksanaan kolaborasi masing-masing *steakholder* diberi tata cara pelaksanaan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah akan tetapi peran dan tanggungjawab dari masing-masing di sesuaikan dengan bidang masing-masing. Pembagian akuntabilitas

ini dapat terlihat dari kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan untuk masing-masing *stakeholders*. Dalam penyediaan modal kolaborasi pemerintah dengan BNI bertanggungjawab terkait pemberian dana bantuan kepada kelompok usaha jika dana APBD kurang untuk mencukupi kebutuhan usaha dan kelompok usaha bertanggung jawab untuk melaporkan dana bantuan dipergunakan untuk kegiatan apa saja dalam pelaksanaan usaha dalam kolaborasi ini sudah tertulis dengan jelas prosedur yang wajib di patuhi oleh masing-masing *stakeholder* sehingga tidak terdapat pembagian keputusan untuk masing-masing *stakeholder*.

Hal ini disampaikan oleh salah satu pihak staff BNI sebagai berikut:

“ setelah dari pihak kami meberikan bantuan kepada selah satu kelompok usah selanjutnya kami mebuatkan lamporan untuk pemerintah terkait berapa nominal uang dan kepada kelompok mana kami memberikan bantuan tersebut”

Pihak kelompok masyarakat atau kelompok usaha memberikan laporan terkait dana bentuan sudah digunakan untuk apa saja diserahkan kepada RT selaku pendamping sosial dari kolompok usaha untuk diserahkan kepada pemerintah pusat, hal ini di karenakan RT disini mempunya peran besar dalam program OVOP ini yaitu sebagai ujung tombak pelaksanaan program ini jadi untuk memudahkan pemerintah pusat memantau perkembangan usaha pemerintah melalui RT melakukan monitoringnya.

Hal ini disampaikan oleh ibu yanti sebagai berikut:

“ kelompok usaha meberikan laporan dana bantuan yang sudah digunakan untuk apa saja kepada RT, nanti selebihnya yang ngurus RT untuk diserahkan kepada pemerintah pusat “

Sedangkan untuk pelaksanaan pameran pertanggung jawaban penuh diberikan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koprasi bersama Dinas Kebudayaan, dan Pariwisata. Dalam pelaksanaan kolaborasi ini pemerintah bersama-sama dengan kelompok usaha dalam kegiatan ini untuk menjaga *stand* dan mempromosikan hasil produknya di stand masing-masing.

Berdasarkan hasil penjelasan di atas keterlibatan dari masing-masing *stakeholder* untuk berbagai keputusan sudah dilakukan, masing-masing dari *stakeholder* selalu memberikan laporan atau pertanggung jawaban terhadap semua kegiatan atau keputusan yang sudah dijalankan.

7. Berbagi Informasi

Adanya kemudahan akses informasi, perlindungan *privacy* antara anggota dan bukan anggota, dalam kolaborasi pemberi bantuan modal antara pihak BNI dan kelompok usaha informasinya tertutup karena pihak BNI hanya akan memberikan bantuan kepada kelompok usaha yang datanya telah diajukan oleh pemerintah. Pihak BNI hanya memberi akses informasi kepada pihak pemerintah terkait dana yang diberikan kepada kelompok

usaha walaupun dana bantuan tersebut diberikan oleh pihak BNI diserahkan langsung kepada pihak kelompok usaha yang disampaikan melalui laporan pertanggung jawaban kepada pemerintah.

Hal ini disampaikan oleh salah satu staff BNI mengatakan bahwa:

“ pemberian dana bantuan disini kami hanya memberikan sesuai dengan data yang sudah masuk ke kami yang diberikan oleh pemerintah kepada kami “

Sedangkan untuk pameran, akses kemudahan mendapatkan informasi masih belum maksimal, hal ini karena pemerintah hanya meberikan informasi melalui undangan, hal tersebut dirasa kurang efektif oleh kelompok usaha.

Hal ini disampaikan oleh ibu yanti sebagai berikut:

“bahwa pamberian informasinya tidak kesemu kelompok usaha tapi hanya kepada kelompok yang aktif saja, sedangkan untuk yang pasif ini kurang diperhatikan.”

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koprasi dan Dinas Kebudayaan, dan Pariwisata berbagai informasi sudah berjalan baik, dari kedua dinas ini selalu bertukar informasi terkait perkembangan prodak unggulan dari setiap daerah yang dikembangkan oleh kelompok usaha OVOP.

Dari beberapa hal diatas akses informasi belum berjalan baik dari masing-masing *stakeholder* karena akses informasi yang diberikan kepada kelompok usaha yang sudah aktif dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan, hal ini perlu diperbaiki lagi karena akan merugikan untuk pemerintah sendiri sebab pemerintah tidak dapat melihat potensi besar yang sebenarnya belum tergali dan untuk kelompok usaha yang pasif agar lebih aktif lagi untuk mencari informasi dan menjalin komunikasi baik dengan pihak pemerintah.

8. Akses Terhadap Sumberdaya

Sumber daya yang dibutuhkan terdiri dari sumber daya manusia, sumber keuangan, teknis, dan beberapa sumber lainnya yang bisa mendukung untuk menyukseskan atau membantu melancarkan program OVOP dalam mencapai tujuannya. Bila memungkinkan pemerintah berperan sebagai penyedia sumber daya keuangan dan sumber lainnya.

Adanya program penyedia modal untuk mencukupi sumber dana yang didapat dari dana APBD, hal ini dilakukan karena pemerintah tidak bisa menyediakan dana untuk kelompok usaha secara langsung untuk memenuhi kebutuhan usaha yang dibutuhkan sebab pendanaan yang dibutuh sekarang perlu dimasukan perencanaan keuangan priode selanjutnya, hal ini

disampaikan ibu Eni Kriswandari selaku analis pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

“ karena dana APBD tidak bisa langsung dicairkan tetapi kita harus membuat perencanaan keuangan untuk tahun berikutnya tetapi jika keperluan dari kelompok usaha mendadak harus segera disediakan maka kami mencari dana bantuan melalui CSR”.

Sedangkan terkait dengan penyelenggaraan pameran memerlukan tim sumber daya manusia yang banyak untuk membentuk tim kerja atau tim koordinasi dalam melaksanakan peran tersebut. Oleh karena itu pihak melakukan kerjasama dengan lintas OPD yang berkopeten dimasing-masing tim untuk melaksanakan tugas yang diberikan.

Berdasarkan hal tersebut akses sumber daya yang dibutuhkan dalam kolaborasi ini adalah sumber dana dan sumber daya manusia. Sumber dana yang digunakan dalam kolaborasi ini terbatas dari dana APBD, dan untuk memenuhi pendanaan tersebut pemerintah bekerja sama dengan pihak BNI untuk selanjutnya perlu bekerja dengan *stakeholder* lainnya untuk membantu peminjaman pemodalannya jangan hanya kepada satu *stakeholder*. Sedangkan untuk sumber daya manusia masih diperlukan lagi bekerjasama dengan *stakeholder* lainnya sebagai pendukung dan pengawas disemua kegiatan jadi tidak dominan pihak pemerintah yang melaksanakan kegiatan.

Tabel 3.1 : Matrik Hasil Analisis Keberhasilan *Colaborative*

Governance

NO	BENTUK KOLABORASI	INDIKATOR KEBERHASILAN	HASIL	KESIMPULAN
1.	Penyediaan Modal Usaha	Struktur Jaringan	Hirarki berada di intansi masing-masing	Melihat dari hasil kolaborasi penyediaan modal usaha dinilai kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan <i>stakeholder</i> terdapat beberapa kriteria yang belum memenuhi yaitu adanya kurang percaya antara pihak pemerintah dengan kelompok usaha terkait dana bantuan, transparansi antara pihak BNI dengan kelompok usaha masih kurang dan penyampaian informasi masih terbatas. Kolaborasi ini dianggap sudah berjalan cukup baik akan tetapi kedepannya pemerintah perlu memperbaiki beberapa hal.
		Komitmen Terhadap Tujuan	Kurang adanya komitmen dari pemerintah, karena pemerintah lebih mengutamakan kelompok usaha yang sudah memilik embrio usaha	
		Adanya Saling Percaya	- Adanya rasa ketidakpercayaan pemerintah dengan kelompok usaha terkait dana bantuan - Kepercayaan pemerintah dan csr sudah baik	
		<i>GOVERNANCE</i>	Sudah jelas siapa saja anggotanya dan apa wewenangnya	
		Akses Terhadap Kekuasaan	Sudah diatur dengan jelas kewenangan masing-masing <i>stakeholder</i>	
		Pembagian Akuntabilitas	Sudah terdapat proseder sehingga tidak terdapat pembagian kekuasaan	
		Berbagi Informasi	Kurang adanya	

			keterbukaan antara pihak CSR dengan kelompok usaha	
		Akses Terhadap Sumberdaya	Sumber dana dari APBD	
2.	Pameran	Struktur Jaringan	Tidak ada hirarki karena kelompok usaha merupakan <i>stakeholder independent</i>	Melihat dari 8 indikator tersebut kolaborasi dalam pelaksanaan pameran dikatakan cukup berhasil akan tetapi ada satu indikator yang belum memenuhi kriteria yaitu masih minimnya informasi untuk kelompok usaha.
		Komitmen Terhadap Tujuan	Dinas mempunyai komitmen yang baik dengan penyelenggaraan pemeran untuk menigatkan promosi prodak dari kelompok usaha OVOP	
		Adanya Saling Percaya	Sudah ada kepercayaan antara dinas, dan kelompok usaha	
		<i>GOVERNANCE</i>	Sudah jelas siapa saja anggotanya dan apa wewenangannya	
		Akses Terhadap Kekuasaan	Belum ada prosedur yang jelas dengan kelompok usaha	
		Berbagi Informasi	Informasi masih terbatas	
		Akses Terhadap Sumberdaya	Sember dana dari APBD masih terbatas	